

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN
(Studi Kasus Kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) Jl. Perintis
Kemerdekaan Boyolali)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

FAHIRA SALSABILA

C100170001

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN

(Studi Kasus Kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) Jl. Perintis Kemerdekaan
Boyolali)

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

FAHIRA SALSABILA

C100170001

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN

(Studi Kasus Kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) Jl. Perintis Kemerdekaan
Boyolali)

OLEH

FAHIRA SALSABILA

C100170001

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 17 Juni 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andrea Luhur P., S.H., M.Kn.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)



Dekan




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

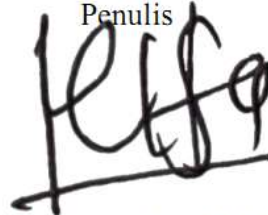
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat juga karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 17 Juni 2021

Penulis



FAHIRA SALSABILA

C 100170001

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN

(Studi Kasus Kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) Jl. Perintis Kemerdekaan Boyolali)

Abstrak

Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam hal kerjasama kemitraan untuk melakukan sesuatu. Salah satu contoh dari Perjanjian kerjasama kemitraan adalah bisnis kemitraan Waroeng Spesial Sambal atau disingkat dengan “SS”. Permasalahan yang terdapat pada perjanjian kemitraan ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan antara kedua belah pihak dan perlindungan hukum bagi mitra usaha dalam hal terjadi wanprestasi oleh pemilik usaha Waroeng Spesial Sambal (SS). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang sumber data primernya adalah surat perjanjian kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) dan sumber data sekundernya adalah data lain yang berhubungan dengan perjanjian kemitraan jasa boga/warung yang menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perjanjian kemitraan ini telah memenuhi syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, masih terjadi wanprestasi oleh pemilik usaha Waroeng Spesial Sambal (SS) dan juga adanya keadaan memaksa (*overmacht*) dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Kata kunci : perjanjian kemitraan, wanprestasi, pelaksanaan perjanjian

Abstract

A partnership agreement occurs between two or more parties in which the parties have agreed on the provisions that have been made in terms of partnership cooperation to do something. One example of partnership agreement is the partnership business of Waroeng Spesial Sambal (SS) or can be known as (SS). The problems contained in this partnership agreement is regarding the implementation of the partnership agreement between the two parties and legal protection for business partners in the event of non performance of contract by the business owner of Waroeng Spesial Sambal (SS). This study uses a normative judicial approach where the primary data source is the Waroeng Spesial Sambal (SS) partnership agreement and the secondary data source is other data related to the catering service partnership agreement using descriptive research. From this study, it was found that this partnership agreement has fulfilled the legal requirements of the agreement and the principles of the agreement according to Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. However, there are still non performance of contract by the business owner of Waroeng Spesial Sambal (SS) and there are also force majeure (*overmacht*) due to the Covid-19 pandemic.

Keywords: partnership agreement, non-performance of contract, execution of the agreement.

1. PENDAHULUAN

Untuk memenuhi tuntutan gaya hidup seseorang tidaklah cukup dengan hanya mengandalkan penghasilan dari gaji. Maka dari itu, banyak orang mencari cara untuk mendayagunakan uang yang dimilikinya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan usaha kemitraan. Kemitraan adalah Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan Usaha Besar.

Selanjutnya, perjanjian kerjasama kemitraan terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam hal kerjasama kemitraan untuk melakukan sesuatu, seperti yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu contoh dari Perjanjian kerjasama kemitraan adalah bisnis kemitraan Waroeng Spesial Sambal atau disingkat dengan “SS”. Sistem kemitraan yang dijalankan hanya menyertakan modal berupa uang tanpa menjalankan operasional usaha (pasif).

Hal-hal yang diatur oleh hukum merupakan suatu ‘das sollen’ yang berarti apa yang seharusnya, sehingga dalam suatu perjanjian kemitraan kemitraan ‘das sollen’ ini berarti apa yang harus ditaati oleh para pihak baik pemilik usaha maupun mitra usaha, sehingga perjanjian itu dapat berjalan tanpa adanya masalah, tetapi pada kenyataannya / ‘das sein’ sering terjadi penyimpangan yang menimbulkan wanprestasi. Adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kemitraan ini membuat penulis tertarik untuk membuat tulisan penelitian tentang **“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN (STUDI KASUS KEMITRAAN WAROENG SPESIAL SAMBAL (SS) JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BOYOLALI)”**.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara mitra usaha dan pemilik usaha jasa boga/warung makan Waroeng Spesial Sambal (SS)?; *Kedua*, Bagaimana perlindungan hukum bagi mitra usaha dalam hal terjadi wanprestasi oleh pemilik usaha jasa boga/warung makan Waroeng Spesial Sambal (SS)?

2. METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yang sumber data primernya adalah surat perjanjian kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) dan sumber data sekundernya adalah data lain yang berhubungan dengan perjanjian kemitraan jasa boga/warung yang menggunakan jenis penelitian deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) cabang Boyolali

3.1.1 Isi Perjanjian Kemitraan Waroeng Spesial Sambal SS cabang Boyolali

Suatu perjanjian merupakan sebuah peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak yang lain, atau dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Subekti, 1979). Seperti halnya perjanjian kemitraan yang dibuat oleh Mitra Usaha dan Pemilik Usaha Jasa Boga/Waroeng Spesial Sambal (SS) untuk saling berjanji melaksanakan sesuatu. Perjanjian Kemitraan Waroeng Spesial Sambal SS ini memuat 15 Pasal yang terdiri dari 3 BAB. Perjanjian Kemitraan yang dibuat oleh para pihak tersebut telah memenuhi semua syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sesuai ketentuan yang di atur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal. Ditinjau dari asas-asas perjanjian, perjanjian kemitraan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut : Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Pacta Sunt Servanda, Asas Itikad Baik, Asas Kepribadian.

Perjanjian Kemitraan secara tertulis yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan akta dibawah tangan, karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan untuk pembuatan akta dibawah tangan, keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila

dikemudian hari terjadi suatu masalah dan/atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam perjanjian maupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang berkepentingan, keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut (Richard, 2015).

Dalam wawancara penulis dengan Pihak Kedua yaitu Bapak Agus dan dengan melihat dari surat perjanjian yang ada, diketahui bahwa tidak ada satu orang pun yang menyaksikan dan menjadi saksi disaat perjanjian itu dilakukan.

3.1.2 Permasalahan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Mitra

Usaha dan Pemilik Usaha Waroeng Spesial Sambal (SS) cabang Boyolali
Pada Pasal 8 surat perjanjian kemitraan telah dijelaskan bahwa sebagai direktur perusahaan yang bertanggung jawab atas berjalannya manajemen dan operasional perusahaan maka Pihak Pertama memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan dan perkembangan perusahaan paling sedikit satu kali dalam satu bulan kepada Pihak Kedua. Di awal pertama kemitraan berjalan aman dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi mulai tahun ke-4 kemitraan ini berlangsung, tepatnya pada bulan Februari 2013, dari Pihak Pertama melaporkan laporan keuangan bulan Desember 2012 pada Februari 2013 dan pada saat yang bersamaan Pihak Pertama memberikan surat pemberitahuan kepada Pihak Kedua yang mana pada intinya bahwa mulai bulan Februari 2013 Pihak Pertama berfokus pada penyehatan dan penguatan usaha dengan memberlakukan standarisasi periode sharing/bagi hasil dimana pembagian laba hasil usaha akan diberlakukan enam bulan sekali : bulan Juni dan bulan Desember dimana surat pemberitahuan ini dilakukan secara sepihak. Yang artinya Pihak Pertama telah melakukan wanprestasi terhadap Pihak Kedua.

3.1.3 Pembagian Laba Usaha Waroeng Spesial Sambal (SS) cabang Boyolali

Dalam pelaksanaan pembagian keuntungan yang ada di Waroeng Spesial Sambal (SS) ini tidak berjalan dengan sempurna, dikarenakan adanya masalah. Permasalahan dari pelaksanaan pembagian keuntungannya yaitu pembagian laba usaha yang mundur ini terkendala dikarenakan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pembagian laba yang seharusnya dibayarkan

setiap 3 bulan sekali namun menjadi dibayarkan dalam kurun waktu 6 bulan sekali. Hal ini masuk kedalam keadaan memaksa (*overmacht*) karena adanya pandemi yang menyebabkan turun omset yang tidak terduga dan keadaan ini menjadi pengecualian karena dari Pihak Pertama pun tidak ingin ini terjadi. Pembagian laba mulai bermasalah hampir sama dengan laporan keuangan tetapi berbeda bulan. Permasalahan pembagian laba dimulai pada Maret 2013 tetapi kali ini tanpa pemberitahuan dari Pihak Pertama. Jadi mulai dari bulan Maret 2013 itu pembagian laba sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak di awal. Dan masalah ini sama kasusnya dengan laporan keuangan yang juga mundur. Masalah ini masuk kedalam kategori wanprestasi yaitu tidak tercapainya suatu prestasi.

Kemudian pada bulan April 2020 Pihak Pertama menyampaikan surat konfirmasi penundaan sharing yang berisi kebijakan penundaan bagi hasil atas proporsi laba mulai periode laporan bulan Januari 2020 sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan dikarenakan dampak turunnya omset akibat pandemi Covid-19. Dengan alasan bahwa penundaan sharing sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan usaha Waroeng Spesial Sambal (SS).

3.2 Perlindungan Hukum Mitra Usaha dalam Hal Terjadi Wanprestasi Oleh Pemilik Usaha Waroeng Spesial Sambal (SS) cabang Boyolali

3.2.1 Perlindungan Hukum Secara Umum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaannya bersifat memaksa dan adanya suatu sanksi. Ada 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif dimana Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir setelah terjadinya suatu pelanggaran berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum, sedangkan Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang berasal dari pemerintah yang bertujuan guna mencegah sebelum terjadinya pelanggaran (Muchsin, 2003).

3.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Para Mitra Dalam Perjanjian Kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) cabang Boyolali

Perjanjian yang dilakukan oleh Waroeng Spesial Sambal (SS) dan Mitra merupakan perjanjian kemitraan bagi hasil. Pada perjanjian kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) dengan mitra yang menjadi objek adalah bagi hasil usaha restoran/warung makan. Klausula-klausula yang memberikan semacam perlindungan hukum atau hak yang diberikan oleh hukum kepada mitra yaitu: Pasal 5 dan Pasal 7 tentang Hak dan Kewajiban; Pasal 8 dan Pasal 9 tentang Hak dan Kewajiban; Pasal 10 tentang Hak dan Kewajiban; Pasal 12 tentang Aturan Tambahan; Pasal 13 tentang Aturan Tambahan; Pasal 14 tentang Aturan Tambahan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang diperoleh diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) cabang Boyolali ini telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah memenuhi asas-asas perjanjian sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun pelaksanaannya sudah sesuai, meskipun masih ditemukan wanprestasi atas Pasal 13 Surat Perjanjian Kemitraan. Selain itu, dalam pelaksanaannya terjadi keadaan memaksa (*overmacht*) akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan omset sehingga Pihak Pertama selaku pemilik usaha perlu melakukan penundaan sharing laba usaha kepada mitra usaha sampai waktu yang belum bisa ditentukan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berupa : 1) Perlindungan hukum secara preventif telah diberikan melalui Surat Perjanjian Kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) cabang Boyolali yang memuat Hak dan Kewajiban masing-masing pihak yang tercantum dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Surat Pasal 12 dan Pasal 13 Perjanjian Kemitraan. 2) Perlindungan hukum secara represif tercantum dalam Pasal 14 dimana penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah dan apabila tidak

mencapai kata mufakat, kedua belah pihak menunjuk Pengadilan Negeri Sleman untuk menyelesaikan permasalahannya.

4.2 Saran

Bagi Waroeng Spesial Sambal (SS) : 1) Perubahan pelaporan keuangan ataupun pembagian laba usaha termasuk kapan waktu pembagiannya seharusnya dilakukan musyawarah dahulu sampai memperoleh kata sepakat. 2) Dilakukan audit laporan keuangan dari pihak eksternal yang netral sehingga laba usaha atau rugi mencerminkan laporan keuangan yang sebenarnya tanpa intervensi dari pihak manajemen Waroeng SS itu sendiri 3) Meningkatkan status bentuk perjanjian kemitraan dari akta dibawah tangan menjadi akta otentik dengan 2 (dua) saksi dihadapan Notaris agar memudahkan kedua belah pihak jika ada permasalahan

Pemerintah : 1) Pemerintah Pusat segera membuat peraturan yang mengatur tentang pola kemitraan bagi hasil seperti halnya pola waralaba yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba dengan menambahkan klausul tentang kewajiban para pihak untuk membuat perjanjian kemitraan dalam bentuk akta otentik dengan 2 (dua) saksi dihadapan Notaris agar memberikan kepastian hukum yang lebih mengikat. 2) Pemerintah Daerah diharapkan mengambil peran untuk mengatur pola kemitraan bagi hasil ini dengan memasukkan klausul yang dibutuhkan dalam Peraturan Daerah yang relevan agar menciptakan perlindungan hukum dan kesetaraan bagi kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen P2M & PL. 2004. Pelatihan Manajemen P2L & PL Terpadu Berbasis Wilayah Kabupaten/Kota Membina Kemitraan Berbasis Institusi. Depkes RI
- Djumialdji, F.X. 1996. *Hukum Bangunan Dasa-Dasar Hukum Dalam Proyek Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hernoko, Agus Yudha. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta
- Prayogo, Sedyo. 2016. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3 Nomor 2
- Qamar, Nurul dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politic Genius
- Salsabila, Fahira. 2021. “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS) cabang Boyolali”. Hasil Wawancara Pribadi: 24 Januari 2021, Genayan Kopi.
- Tambunan, Santonius. 2016. “Mekanisme dan Keabsahan Transaksi Jual Beli E-Commerce Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *Badamai Law Journal, Vol 1, Issues 1*
- Wahyono, Hery Yoyok, dan Agus Tri Nugroho. 2009. *Perjanjian Kemitraan Waroeng Spesial Sambal (SS)*. Yogyakarta.
- Wojowasito, S. 1980. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo.